

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik”, *Otoritas*, Vol. 1 Nomor. 2, 2011.

Dr. Tedi Sudrajad dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta, Sinar Grafika

Erwan Agus Purwanto, 2016, Et. Al., “*Pelayanan Publik*” Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta,

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram,

Musanef, 1995, “*Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*”, Toko Gunung Agung, Jakarta,

Raharjo, Muhamad Mu’iz. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, 2022

Rahman Mulyawan, 2016, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Unpad Press,

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985

Sri Maulidah, 2014, *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung,

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru,

A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil

Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Jurnal

Agustina, Enny. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum* 3.2 (2019): 10.

A. Haryo Yudanto, 2019, *Sengketa Kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terabaikan*, https://jdih.bappenas.go.id/data/file/sengketa_kewenangan_dalam_AP.pdf, diakses pada 2019.

Ashara Putra Mansien, "Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019", *Nakhkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 19 Nomor. 2, 2020.

Herlina, Merli. "Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara." *Universitas Ekasakti Padang* (2021)

Judge, Zulfikar. "Pelayanan Publik atas administrasi kependudukan pada masyarakat kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Abdimas* 5.4 (2019).

Nafisakhatul Layliyah, "Wewenang Hukum Administrasi Negara", https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA, diupload pada oktober 2019

Nur Aini dan Taufik Rachman, "Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas

Pietersz Jemmy Jefry, 2019, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *Sasi* Vol 23, Nomor 2,

Puspitasari, Wasis Cindi. "Analisis Kualitas Layanan Pada Ritel Lokal Mirota Kampus Di Sleman, Yogyakarta." (2018).

Rabiah Nawarisma, "Pelayanan Publik dalam Penerbitan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas", *Governance Jurnal S1-Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 Nomor. 1, 2022.

Rahmadana, Muhammad Fitri, et al, 2020, *Pelayanan Publik*

Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa'adah, 2021 "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3 Nomor 1,

Simamora Arta, 2014, Dasar-dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima (Service Excellence), *Jurnal Media Pustakawan*, Vol. 21, Nomor 3&4, 2014,

SyahirulAlam, Mochammad Doddy. "Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan." *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan* 2.2 (2013)

Tim JDIH Pusat BPK, Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf

Titin Rohayatin, Dkk, "Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintahan", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 1 Nomor. 1, 2017.

Windarti dan Titin Eka Sugiadini, "Pengaruh Pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak, Terhadap Minat Bersalin di PMB Bidan Windarti Kalideres Jakarta Barat Tahun 2022", *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, Vol. 9 Nomor. 3 Tahun 2023.

D. Skripsi

Hanum, Farida. *Analisis Kuntansi dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Akademik di Universitas Dharma Wangsa Medan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2013